

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Melita Angelin Bidara¹
Michael Mamentu²
Trilke Tulung³

Abstrak

Dalam hubungan internasional, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. Skripsi ini membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut Cina Selatan. Dalam penulisan, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti, buku, jurnal, artikel, media cetak, hasil penelitian, dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepentingan nasional dan teori konflik internasional. Penulis mengemukakan bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan ini berdasarkan teori Donald E. Nuechterlin terbagi tiga kepentingan. Pertama, kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini dan mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas di kawasan. Kedua, kepentingan ekonomi khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan ini. Ketiga, kepentingan tata internasional, yaitu Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan kekuatan hegemon atau dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik dan menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum laut internasional.

Kata Kunci: Kepentingan, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Laut Cina Selatan memiliki lebih dari 250 pulau, ato, kay, gosong pasir, dan terumbu. Sebagian besar diantaranya tidak berpenghuni, dan tenggelam saat laut pasang. Laut Cina Selatan terdiri dari 4 kepulauan dan karang, yaitu; Paracel, Sparty, Pratas dan kepulauan Maccaslesfield. Jika dilihat dari inte sitas konflik, Paracel dan Sparty yang lebih menonjol klaim multilateralnya. Pulau Spratly di klaim oleh negara; Brunei Darusallam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan. Sedangkan Pulau Paracel diklaim oleh negara Taiwan dan Vietnam. Menurut penelitian yang diadakan oleh The Committe for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas, Economic Commision for Asia and the Far East, sejak dasawarsa 1960-an di kawasan ini telah ditemukan mineral potensial terutama minyak dan gas.

Dengan segala keuntungan yang dimiliki oleh wilayah Laut Cina Selatan yang demikian ini, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Laut Cina Selatan telah menjadi isu hangat dan perdebatan di dunia internasional. Kawasan ini telah menjadi perebutan oleh negara-negara yang berbatasan langsung atau pun yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Awal mula konflik ini dimulai oleh klaim Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992.

Konflik yang ada di kawasan Laut Cina Selatan berkaitan dengan klaim tumpang tindih atas pulau beserta gugus karangnya, yaitu klaim garis batas laut teritorial, landasan kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut artikel 122 dari Konvensi Hukum Laut (The Law of the Sea Convetion-1982) menyatakan bahwa Laut Cina Selatan tergolong sebagai laut semi-enclosed yang di kelilingi oleh dua negara atau

lebih dan berhubungan dengan lautan atau samudera lain (Hasyim Djalal, Indonesia Quarterly, Vol. XVIII, No.2, 1990). Dari artikel tersebut menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan dikelilingi oleh lebih dari satu negara dan memungkinkan terjadinya perebutan antara negara satu dengan lainnya.

Dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan rata-rata negara yang terlibat di dalamnya adalah negara anggota ASEAN kecuali Cina. Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut cina selatan, para menteri luar negeri di ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila pada tanggal 22 Juli 1992. Dan kemudian pada selanjutnya Cina dan negara anggota ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Kamboja pada 4 November 2002. Tujuan dari deklarasi ini adalah antara lain; mendorong pembanguna kepercayaan (confidence-building measures), kerjasama dibidang kelautan, mempersiapkan pembahasan dan penentuan suatu Code of Conduct yang formal dan mengikat.

Selain dari negara yang berbatasan dengan kawasan Laut Cina Selatan juga terdapat kekuatan-kekuatan ekstra kawasan yang memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India. Bukan hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, tetapi negara diluar kawasan tersebut juga memiliki ketertarikan untuk ikut campur dalam konflik di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa memiliki kepentingan dan peran penting dengan yang terjadi di dalam kawasan Laut Cina Selatan. Amerika serikat sangat

membutuhkan kawasan ini untuk kepentingan nasionalnya, dan mendukung kekuatan mobilitas pasukan militernya serta dominasi globalnya. Selain itu juga, Amerika Serikat memiliki keterkaitan kerja sama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut Amerika Serikat perairan Laut Cina Selatan sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional.

Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat pada masalah kepemilikan kepulauan Spratly. Sengketa kepemilikan kepulauan Spratly terjadi akibat klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh kepulauan dan gugusan karang di wilayah ini. Di dalam sengketa kepulauan Spratly, Amerika Serikat mengkhawatirkan peran Cina yang sangat mendominasi dalam melakukan klaim dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif. Klaim yang dilakukan oleh Cina didasarkan oleh bukti dan fakta historis pada wilayah tersebut.

Menurut McCain, yang adalah mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, Amerika Serikat harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan untuk menghadapi Cina. McCain menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja antara Amerika Serikat dan Cina, akan tetapi Amerika Serikat mempertanyakan sikap agresif Cina dalam wilayah sengketa tersebut dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan.

Dengan memanasnya sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly, Amerika Serikat berkeringinan turun tangan membantu upaya penyelesaian. Penolakan datang dari Cina karena menganggap keterlibatan Amerika Serikat menunjukkan upaya

internasionalisasi sengketa, yang artinya adalah upaya untuk menjadikan masalah sengketa kepulauan Spratly sebagai masalah internasional dengan melibatkan negara-negara dari luar kawasan, seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Australia dan lainnya. Keterlibatan Amerika Serikat dinyatakan melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mempengaruhi upaya penyelesaian yang sedang ditempuh. Amerika Serikat menunjukkan penolakan atas klaim Cina terhadap kawasan sengketa tersebut. Amerika Serikat menyatakan keterlibatan mereka dalam konflik ini dikarenakan negara sekutu dan mitranya meminta bantuan untuk menyakinkan Cina supaya tidak menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengecam negara tetangga, dan sebaliknya mengambil tindakan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat merupakan negara yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas perairan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menyatakan mereka ikut campur dalam konflik Laut Cina Selatan semata-mata hanya demi terjaganya perdamaian antara Cina dan negara-negara tetangga yang bertikai serta upaya kasus klaim wilayah Laut Cina Selatan ini dapat terselesaikan dengan damai dan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat sebagai negara yang selama ini memiliki pengaruh besar terhadap dunia termasuk Asia, tentu tidak bisa menerima begitu saja apabila ada negara yang muncul sebagai pesaingnya dan negara tersebut adalah Cina.

Dengan semakin provokatifnya sikap Cina, Amerika Serikat menunjukkan kepentingannya terhadap keamanan kawasan Laut Cina Selatan, seperti pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 19 September 2013, John Kerry, yang mendorong agar Cina segera menyepakati Code of Conduct yang

telah disusun untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan atau menangani sengketa.

Upaya Amerika Serikat tetap ditolak oleh Cina dan menganggap Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan sengketa. Tindakan-tindakan Cina yang telah melibatkan kekuatan militer dapat mengancam stabilitas dan perdamaian di kawasan. Sejak tahun 2010, Laut Cina Selatan mulai menjadi perluasan strategi yang akhirnya membawa Cina dan Amerika Serikat ingin memiliki dominasi di perairan. Bagi Amerika Serikat, meningkatnya kekuatan baru Cina yang akan nantinya menjadi ancaman dan melahirkan ketakutan dan ketidakstabilan serta bisa menyulut konflik harus menjadi bagian pengembangan strategi Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Karena dengan semakin meningkatnya penyebaran pengaruh Cina adalah sesuatu yang dalam pandangan Amerika Serikat tidak bisa di akomodasi. Bahkan Amerika Serikat secara terang-terangan menunjukkan kepentingannya di Laut Cina Selatan dengan meningkatkan hubungan keamanan dengan sekutu dan para pendukung.

Konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat yang dalam strateginya dikenal dengan Asia's Balancing. Hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam pidatonya, bahwa: "Masa depan Amerika Serikat sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan sangat bergantung kepada peran Amerika Serikat. Dengan demikian Amerika Serikat harus memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama dalam kekuatan maritim." (Menlu AS, Hillary Clinton, East West Intern Honolulu, 14 January 2010 dalam Ralf Emmers, the us

rebalancing strategy: impact on the south china sea. National security college, Australian National University). Pada tahun 2010, ada agenda perluasan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat mengenai persoalan yang terjadi di kawasan sengketa Laut Cina Selatan, sebagai antisipasi terhadap semakin meningkatnya ketegangan yang terjadi antara negara-negara yang memiliki klaim persengketaan.

Kebijakan baru Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan adalah pertemuan tahunan Asian Regional Forum pada bulan Juli 2010. Pada saat pertemuan tertutup tersebut yang dihadiri oleh dua belas negara, Amerika Serikat mengekspresikan perhatiannya pada semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton memberikan pendapatnya mengenai posisi Amerika Serikat terhadap persoalan yang terjadi di kawasan sengketa tersebut dan elemen utama dari kebijakan Amerika Serikat yang sebelumnya sudah di canangkan sejak tahun 1995, termasuk freedom of navigation, penolakan terhadap penggunaan ancaman dan kekuatan bagi pihak yang bersengketa serta sikap netral Amerika Serikat dari persaingan dan klaim negara-negara yang bersengketa.

Peran Amerika Serikat dalam sengketa konflik Laut Cina Selatan semakin terlihat saat menteri luar negeri, Hillary Clinton ikut mendukung dalam persetujuan kongres "Law of the Sea Convention", yang akan mendukung negara-negara lain menantang klaim Cina di daerah sengketa tersebut. Pada Juli 2012, Senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi 524 yang salah satunya menyatakan dukungan penuh Amerika Serikat untuk "202 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea", yang

menunjukkan komitmen Amerika Serikat yang membantu negara-negara Asia Tenggara untuk independen dan kuat dalam konflik Laut Cina Selatan. Meskipun Laut Cina Selatan secara geografis berada jauh dengan Amerika Serikat dan Amerika Serikat tidak memiliki klaim di Laut Cina Selatan, namun Amerika Serikat tetap memiliki kepentingan di wilayah sengketa tersebut. Laut Cina Selatan menjadi penting bagi Amerika Serikat karena jalur perdagangannya.

Tinjauan Pustaka

Dalam hubungan internasional, konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan tujuan dari suatu negara melakukan sebuah hubungan dengan negara lain. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk memahami sebuah perilaku internasional. Kepentingan nasional tercipta karena adanya kebutuhan dari suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal negara, baik dalam bidang ekonomi, militer maupun sosial-budaya. Kepentingan juga didasari oleh 'power' yang ingin diciptakan oleh negara sehingga negara tersebut dapat memberikan dampak dan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Hans J. Morgenthau mengemukakan tentang kepentingan nasional, yaitu the concept of national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.

Kepentingan nasional atau national interest bisa diartikan "*what's good for nation as a whole in international affairs*". Yang artinya bahwa national interest dibuat untuk kebaikan suatu

negara, dan suatu sikap atau kebijakan yang dianggap bisa menguntungkan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain.

Keberagaman dari tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda, setiap negara melihat kondisi dari keunggulan yang dimiliki masing-masing. Sehingga setiap negara melakukan kerjasamanya untuk mencapai suatu kepentingan nasional yang ingin dicapai. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Frederick S Pearson dan J. Martin Rochester menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan utama yang dimiliki suatu negara, yaitu: 1). Tekad kuat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara, termasuk didalamnya adalah melindungi warga negara dan integritas wilayah; 2). Memajukan kesejahteraan ekonomi penduduknya, dan 3). Mempertahankan hak untuk menentukan diri sendiri (kemerdekaan, kedaulatan, otonomi) mengenai sistem pemerintahan yang akan dianut dan aturan-aturan yang akan diberlakukan dalam negeri.

Disamping kepentingan nasional yang disebutkan diatas terdapat pula kepentingan nasional yang sulit diukur, status dan pretise misalnya. Status dan pretise adalah jenis kepentingan yang ukurannya tidak jelas. Keinginan suatu negara agar dunia mengetahui kemajuan teknologi, militer, politik, sosial, budaya, dan lain-lain masuk dalam kategori ini. Dengan merujuk pada kepentingan nasional, para pemimpin nasional (presiden, perdana menteri, raja) berusaha untuk memaksimalkan keuntungan negaranya dalam hubungannya dengan negara lain. Jika diperlukan keuntungan yang akan diraih berada diatas penderitaan negara lain. Biasanya para pemimpin seperti ini

mendefinisikan suatu kepentingan nasionalnya dari berbagai tantangan dan peluang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Donald E. Nuechterlin terdapat 4 jenis kepentingan nasional, yakni; 1). Kepentingan pertahanan, menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari negara lain, 2). Kepentingan ekonomi, menyangkut meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain, 3). Kepentingan tata internasional, menyangkut untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya, 4). Kepentingan ideologi, menyangkut kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman negara lain.

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menjelaskan konsep kepentingan nasional sangat penting untuk memahami perilaku internasional. konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya suatu negara untuk mengejar kekuasaan

atau power. Dalam hubungan internasional power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif. Dalam hal ini hubungan dapat dilakukan dengan teknik paksaan atau melalui kerjasama. Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara dalam dunia internasional.

Dalam kepentingan nasional perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Dalam kehidupan bernegara, konflik mungkin tidak dapat dihindari. Interaksi yang beraneka ragam kepentingan baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai konflik. Permasalahan konflik yang beragam mulai dari konflik ditingkat lokal sampai ditingkat internasional, umumnya memiliki permasalahan

konflik yang sama. Kebanyakan konflik timbul karena posisi yang bertentangan dalam berbagai bidang isu. Jika nilai dan posisi yang bertentangan dari kedua belah pihak dirasakan sebagai fundamental, perilaku para pihak yang ditunjang oleh sikap bermusuhan, tidak percaya dan curiga. Para pihak dalam suatu konflik internasional, biasanya tetapi tidak mutlak adalah pemerintah negara bangsa. Para pihak berusaha untuk mencapai tujuan tertentu, seperti wilayah tambahan atau wilayah yang lebih aman, keamanan, akses menuju pasar, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan yang tidak bersahabat, perubahan dalam prosedur Persetikan Bangsa-Bangsa, dan banyak hal lain. Dalam usaha untuk mencapai atau mempertahankan tujuan ini, tuntutan atau tindakan mereka akan berjalan berlawanan dengan kepentingan dan tujuan pihak lainnya. Webster dalam Pruitt dan Rubin, mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Menurut Surbakti, konflik sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. (Ramlan Surbakti 1999:149).

Dalam buku K.J Holsti terdapat enam tipe utama tujuan negara atau sumber konflik berdasarkan studi atas semua konflik yang terjadi dari periode 1919 sampai dengan 1945, adalah sebagai berikut:

1. Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu

negara di atau dekat wilayah negara lain.

2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.
3. Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.
4. Imperialisme regional, dimana suatu pemerintahan berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologi, keamanan dan perdagangan.
5. Konflik pembebasan, atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karna alasan-alasan etnis atau ideologis.
6. Konflik yang timbul dari suatu pemerintahan untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah.

Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama dan sangat kaya. Simon Fisher (dkk) melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik, dua diantaranya adalah (Simon Fisher 2004:7):

1. teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Isu yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.
2. teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain.

Unit analisis terjadinya konflik antara masyarakat atau etnis dengan negara dapat dipetakan dalam dua kategori besar yakni; (1) konflik domestik belaka yang tidak kemudian berimbas dengan proses pemisahan secara politik ataupun teritorial. (2) konflik antara negara dengan masyarakat atau etnis yang berimplikasi terhadap proses pemisahan diri dari negara. Kategori yang kedua ini kemudian menjadi diskursus konflik dalam wacana separatisme.

Peter Wallensteen dalam Jemadu dengan bukunya berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System* menyebutkan tiga tipe konflik internasional yaitu: (1) konflik antar negara (interstate conflict), (2) konflik internal (internal conflict), dan (3) konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (state formation conflict).

Variabel yang sangat sering digunakan untuk mengurangi eskalasi konflik adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama. William Zartman mengusulkan variabel negosiasi preventif melibatkan pihak ketiga dengan mempertimbangkan stakes, attitude, tactic (masalah, cara menyikapi masalah, dan taktik yang dilakukan) guna mengurangi eskalasi konflik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut John W. Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk

mengeksplorasi dan memahami makna (meaning) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. (Cresswell:2013), teknik analisa data yang akan digunakan penulis adalah Analisis Sekunder (secondary analysis), analisis sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah. Menurut Vogel Hinds (et al), tujuan analisis sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif (alternative point of review) atau perspektif baru atas data yang telah terkumpul.

Hasil Penelitian

Meningkatnya kekuatan ekonomi, diplomatik, dan militer Cina, kawasan Asia Pasifik menjadi pusat perhatian Amerika Serikat khususnya yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan akan semakin berkembang dan Amerika Serikat merasa untuk terus aktif terlibat atau akan kehilangan pengaruhnya di dunia. Kekuatan Amerika Serikat dan kebijakannya merasa diperlukan untuk mempertahankan kekuatan ekonomi, diplomatik dan militer yang dimiliki negara adidaya tersebut.

Sesuai dengan judul penelitian, penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan Amerika Serikat terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Seperti diketahui Amerika Serikat secara letak geografis berada jauh dari kawasan Laut Cina Selatan, namun keterlibatan Amerika Serikat terlihat cukup intens dalam kawasan konflik ini. Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan peran dan Keterlibatan Amerika Serikat, Kepentingan Amerika Serikat dan

Kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan konflik Laut Cina Selatan.

Ketegangan yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan yang semakin memanas menarik perhatian Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam konflik tersebut untuk mencegah ketegangan menjadi konflik terbuka. Bahkan saat ini Amerika Serikat merupakan salah satu aktor penting dalam konflik di kawasan ini. Keterlibatan Amerika Serikat pada konflik ini dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an, Amerika Serikat pertama kali mengartikulasi kebijakannya saat terjadi ketegangan akibat pembangunan yang dilakukan Cina di Mischief Reef pada tahun 1995. Salah satu alasan keterlibatan Amerika Serikat pada konflik ini tidak lepas dari kekhawatiran Amerika Serikat pada kekuatan militer Cina di kawasan konflik ini dan ketergantungan Amerika Serikat di kawasan ini sebagai jalur pelayaran internasional untuk menjalin hubungan dengan benua lain. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton saat masih menjabat menyatakan bahwa Amerika Serikat merasa berkepentingan dalam menjamin kebebasan bernavigasi di Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat menyatakan bahwa peran dan keterlibatannya dalam konflik Laut Cina Selatan hanya dalam upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal di perairan internasional, menjaga perdamaian dan mengurangi resiko sengketa di kawasan. Upaya Amerika Serikat tersebut diikuti dengan berbagai kerja sama militer di wilayah konflik, seperti kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Filipina dan kerja sama dengan Vietnam. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat dengan Filipina adalah menjadikan Filipina negara sekutunya yang didasari oleh Mutual Defense Treaty tahun 1951. Kedua negara telah banyak melakukan aktivitas militer untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan militer

Filipina dalam merespon ancaman keamanan.

Pada tahun 2009, Amerika Serikat mulai lebih memperhatikan kawasan sengketa Laut Cina Selatan yang disebabkan karena dua faktor. Pertama, ancaman Cina terhadap perusahaan minyak Amerika Serikat yang beroperasi di laut lepas pantai Vietnam pada tahun 2008 yang menandai pertama kalinya Cina menantang kepentingan komersial dan perusahaan Amerika Serikat secara langsung. Kedua, pelecehan Cina terhadap kapal USNS *Impeccable* dan kapal angkatan laut Amerika Serikat.

Bentuk keterlibatan lain Amerika Serikat adalah dengan melaksanakan kerja sama dengan Vietnam adalah melakukan hubungan ekonomi dengan penjualan senjata ke Vietnam dan kerja sama militer yang ditandai dengan latihan bersama angkatan laut. Amerika Serikat juga melakukan peningkatan profesionalisme militer Vietnam dengan mengadakan kegiatan *peacekeeping*, keamanan lingkungan, dan kegiatan tanggap bencana.

Selain melalui kerja sama militer, keterlibatan Amerika Serikat di wilayah konflik berupa kegiatan eksplorasi sumber daya, misalnya pada tahun 2011 perusahaan ExxonMobil Amerika Serikat melakukan survei pengeboran minyak di blok 119 yang dijalankan oleh perusahaan nasional Vietnam.

Dalam penelitian ini, pendapat penulis bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan khususnya dalam melaksanakan kerja sama dengan negara-negara yang ikut terlibat adalah upaya untuk mengimbangi adanya kekuatan Cina dan mencegah berbagai bentuk klaim yang menyimpang dari hukum laut internasional. Bentuk utama dari keterlibatan Amerika Serikat, antara lain pergeseran pasukan militer ke Asia-Pasifik, tuntutan terhadap ASEAN, dan

kerja sama terhadap Filipina dan Vietnam. Pada awal tahun 2012 departemen pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan strategi yang berjudul *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, dalam dokumen tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa:

‘U.S. economic and security interests are inextricably linked to developments in the arc extending from the Western Pacific and East Asia into the Indian Ocean region and South Asia, creating a mix of evolving challenges and opportunities’.

Bentuk keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat saat Presiden Barack Obama masih menjabat, menyatakan untuk melakukan penghentian tindakan reklamasi, pembangunan infrastruktur dan militerisasi di kawasan itu. Alasan Amerika Serikat melaksanakan kerja sama dengan angkatan laut negara-negara lain yaitu, bahwa Amerika Serikat membutuhkan pendekatan untuk tetap menjadi yang terdepan di seluruh dunia dengan meningkatkan kepedulian mengenai kebebasan navigasi. Keterlibatan dan aktivitas-aktivitas Amerika Serikat di kawasan konflik Laut Cina Selatan memperlihatkan keseriusan Amerika Serikat dalam memperbesar kehadirannya di kawasan konflik ini. Secara langsung maupun tidak langsung Amerika Serikat memberikan pengaruh bagi perkembangan sengketa di kawasan ini. Amerika Serikat menentang segala bentuk intervensi yang dilakukan Cina yang mengundang makin meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Amerika Serikat merasa kawasan ini yang berdasarkan UNCLOS bahwa setiap negara berhak untuk melakukan navigasi selama tidak mengancam perdamaian dan keamanan mengingat klaim Cina yang tidak mempedulikan hukum laut internasional di kawasan Laut Cina Selatan.

Sebelumnya Amerika Serikat juga berupaya untuk melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS. Pada tahun 2012, Menteri Luar Negeri pada masa itu, memberikan kesaksian untuk memperjuangkan ratifikasi perjanjian tersebut. Clinton menyebutkan bahwa, “Joining the convention would secure our navigation right and our ability to challenge other countries’ behaviour on the firmest and most persuasive legal footing, including in critical areas such as the South China Sea and the Arctic. Only as a party to the convention can the United States protect the navigational freedom enshrined in the Convention and exert the level of influence that reflect our status as the world’s foremost maritime power.”

Menurut kesaksian Clinton tersebut, tindakan Amerika Serikat meratifikasi perjanjian UNCLOS akan memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dan menguatkan kemampuan Amerika Serikat untuk mencegah klaim negara lain secara hukum. Proses ratifikasi ini menunjukkan keterlibatan langsung Amerika Serikat terhadap konflik Laut Cina Selatan. Untuk meratifikasi perjanjian tersebut Amerika Serikat membutuhkan persetujuan dari dua pertiga senat, Clinton sudah berusaha untuk mendesak senat menyetujui ratifikasi ini tetapi tak satu pun dari mereka yang mampu mengamankan suaranya di senat. Hingga saat ini, baik presiden Trump atau kabinetnya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait ratifikasi perjanjian UNCLOS.

Meskipun Amerika Serikat tidak dapat menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi Amerika Serikat dapat berkontribusi untuk memfasilitasi, menyeimbangkan, dan mendukung upaya internasional untuk menciptakan solusi yang dapat memiliki manfaat jangka panjang untuk semua pihak yang terlibat. Amerika Serikat juga merasa bahwa untuk mencapai kepentingan

nasionalnya maka diperlukan kekuatan nasionalnya. Keterlibatannya di kawasan konflik ini didasari oleh kepercayaan diri Amerika Serikat dalam kepemilikan kekuatannya.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah konflik klaim yang tumpang tindih antara negara satu dengan negara lainnya yang memiliki kepentingan di dalamnya, baik negara yang berdaulat langsung dengan kawasan tersebut maupun yang tidak. Konflik ini masih memanas sampai saat ini sejak pertama saat berlangsung yaitu sekitar tahun 1990-an. Konflik ini masih menjadi isu internasional yang masih dicari jalan keluar penyelesaiannya

Seperti yang sudah dijelaskan, Cina selama beberapa tahun telah berusaha untuk mengambil kontrol atas perairan Laut Cina Selatan. Klaim yang Cina lakukan meliputi hampir sebagian besar wilayah tersebut, Cina menggunakan acuan “nine-dash line” sebagai acuan klaim mereka tersebut. Hal inilah yang memicu konflik dimulai yang sebelumnya perairan ini dianggap sebagai perairan internasional, yang artinya tidak ada negara yang bisa mengklaim wilayah tersebut.

Secara geografis Laut Cina Selatan memegang peran penting dalam penghubung antara negara Asia dan Eropa, dan secara ekonomi Laut Cina Selatan mengandung banyak sekali kekayaan alam yang belum dihitung secara pasti nilai yang ada didalamnya, hal inilah yang membuat negara-negara yang terlibat konflik berusaha melindungi klaim mereka.

Untuk negara seperti Amerika Serikat, yang mana merupakan negara diluar kawasan konflik Laut Cina Selatan merasa memiliki andil untuk penyelesaian konflik ini. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak

terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Amerika Serikat menginginkan Laut Cina Selatan untuk tetap sebagai perairan internasional. Amerika Serikat telah ikut terlibat baik secara politik maupun secara militer dalam konflik ini.

Dalam menghadapi Cina, Amerika Serikat melakukan kerja sama atau memberikan bantuan kepada negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Seperti kerja sama yang dilakukan dengan Filipina dan Vietnam. Strategi ini digunakan Amerika Serikat dikarenakan letak geografisnya yang berada jauh dari kawasan Laut Cina Selatan. Alasan lain Amerika Serikat menggunakan strategi ini untuk tidak terlibat langsung karena dapat meminimalkan resiko yang akan diterima Amerika Serikat bila suatu saat terjadi perang terbuka

Strategi yang dilakukan Amerika Serikat melalui negara-negara sekutunya adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat terus beraktifitas, memantau perkembangan tindakan Cina dalam konflik itu, serta menjaga eksistensinya sebagai negara hegemon di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki kebijakan Freedom of Navigation yaitu kebijakan untuk kebebasan bernavigasi di kawasan perairan tersebut. Yang menurut mantan presiden Barack Obama bahwa Amerika Serikat bebas untuk terbang, berlayar, maupun beroperasi selama hukum laut internasional memungkinkan.

Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat dalam konflik ini, yaitu untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi di perairan tersebut. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini, misalnya di jalur perdagangan internasional. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang

memiliki ekspor dan impor terbesar di dunia sangat membutuhkan akses tersebut dikarenakan perairan ini merupakan penghubung jalur perdagangan.

Selain dari kepentingan itu, Amerika Serikat juga ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan statusnya sebagai negara adidaya. Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada Cina bahwa mereka masih memiliki kekuatan hegemon di Asia Pasifik dan ingin menunjukkan eksistensinya dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan

Saran

Seperti yang diketahui walaupun Amerika Serikat tidak memiliki sengketa di Laut Cina Selatan akan tetapi Amerika Serikat memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan menegakkan hukum internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat di bidang perdagangan internasional. Adapun beberapa saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat perlu menindak lanjuti masalah ratifikasi UNCLOS. Sampai sejauh ini belum ada perkembangan tentang sikap Amerika Serikat untuk meratifikasi UNCLOS, menurut penulis dengan meratifikasi UNCLOS maka Amerika Serikat akan mendapatkan hak untuk duduk bersama dan membahas terkait aturan ZEE bahkan bisa memajukan strategi Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan.
2. Mengadakan komunikasi antara negara yang terlibat dan memastikan perdamaian serta keamanan didalam kawasan Laut Cina Selatan guna mencapai kestabilan kawasan

tanpa menimbulkan ketegangan yang baru. Amerika Serikat juga perlu mengadakan pendekatan bilateral maupun multilateral guna menghindari provokasi Cina yang lebih rumit di masa yang akan datang.

3. Amerika Serikat perlu untuk memastikan sikap dan kebijakan Cina untuk konflik Laut Cina Selatan, oleh karena itu Amerika Serikat membutuhkan keterlibatan diplomatik yang aktif yang didukung perkembangan militer dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sebuah kebijakan yang realistis untuk mendukung kekuasaan Amerika Serikat serta mendukung secara aktif kerja sama berbasis aturan sehingga hubungan Amerika Serikat dan Cina dapat menghindari konflik militer.
4. Diadakannya forum komunikasi atau dialog internasional antara negara yang berkonflik di kawasan. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini maka setiap negara yang terlibat dapat membahas masalah yang menjadi kecurigaan selama ini di kawasan Laut Cina Selatan dengan berbasis aturan internasional yang ada sehingga setiap negara yang memiliki kepentingan dapat mencapai kesepakatan bersama dan tetap menjadikan kawasan perairan ini sebagai perairan internasional tanpa adanya klaim konflik yang menimbulkan ketegangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Sidiq. 2011. Resolusi Konflik di Dunia Islam. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Aleksius, Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

- Bond, Larry. 2015. *Konflik Laut Cina Selatan*. Andy Publisher
- Coulumbis, Theodore A dan James H. Walfe. 1987. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. London; Pretince-Hall
- Cressweel, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodes Approaches*. California: SAGE Publication, Inc. Sorensen
- Djalal, Hasjim. 1995. *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta; The British Council
- Goh, Evelyn. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Regional Strategies*. Washington; East-West Center
- Goldstein, Joshua S dan Jon C. Pevehouse. 2010. *International Relations*. Longman: New York. Hal.71
- Holsti, K.J. 1987. *International Politics: A Framework for Analysis*, Fourth Edition. Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya
- Jackson, Robert. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta; PT. Pustaka LP3ES
- Nasution, Dahlan. 1984. *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung; Remadja Karya CV
- Nucterlain, Donald E. 1979. *National Interest A New Approach*, Orbis. Volume 23. No.1 (Spring).
- Pearson, Frederick S dan J Marthin Rochester. 1998. *International Relation: The Global Condition in the Twenty-First Century*. New York: McGraw-Hill
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Pruit, Dean G dann Rubin Jeffery Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia
- Soekanto, Soejono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali
- Sokolsky, Richard dan Angel Rabasa, C.R. Neu. 2000. *The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China*. Santa Monica; Rand
- Usman, Asnani & Rizal Sukma. 1997. *Konflik Laut Cina Selatan, Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta : Centre for strategic and International Studies (CSIS)
- Wallensteen, Peter. 2002. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System*. London; SAGE
- JURNAL/ARTIKEL/WEBSITE
RESMI INTERNASIONAL
<https://projects.voanews.com/south-china-sea>
<https://amti.csis.org/>
<http://www.southchinasea.org/maps/territorial-claims-maps/>
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan
<http://kemenlu.go.id> Website Resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia
<http://ekonomi.kompas.com/read/2011/06/22/04392257//China.Tantang.Vietnam.Perang>
<http://dunia.news.co.id/news/read/4254-20-as-desak-cina-selesaikan-konflik-di-perairan-sengketa>
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Cronin, Patrick M dan Robert D. Kaplan. 2012. *Cooperation from Strength: U.S Strategy and The South China Sea*. Diakses melalui

- https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS_CooperationFromStrength_Cronin_1.pdf
- Glaser, S Bonnie. 2015. *Conflict in the South China Sea*. New York: Council on Foreign Relations diakses melalui: https://cfrd8files.cfr.org/sites/default/files/pdf/2015/04/CPM_Update_South_China_Sea_.pdf
- Bouchat, Clarence J. *The Paracel Island and U.S Interest and Approaches in the South China Sea*. Diakses melalui: <http://ssi.armywarcollege.edu/pdf/files/pub1207.pdf>
- Bouchat, Clarence J. 2017. *U.S Landpower in The South China Sea*. diakses melalui: <http://publications.armywarcollege.edu/pubs/3350.pdf>
- Fravel, M. Taylor. 2014. *U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995*. Policy Report. S Rajaratman School of International Studies. Diakses melalui: <https://taylorfravel.com/documents/research/fravel.2014.RSIS.us.policy.scs.pdf>
- Glaser, S Bonnie. 2012. *Armed Clash in the South China Sea*. New York: Council on Foreign Relations. Diakses melalui: https://cfrd8files.cfr.org/sites/default/files/pdf/2012/04/CPA_contingencymemo_14.pdf
- Heinzig, Dieter. 1976. *Disputed Islands in the South China Sea*. Institute of Asian Affairs in Hamburg
- Joshi, Manoj. 2016. *The South China Sea Disputes: Territorial Claims, Geopolitics, and International Law*. Diakses melalui: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2016/08/ORF_OccasionalPaper_97.pdf
- Jr, Chas W Freeman. 2015. *Diplomacy on the Rocks: China and Other Claimants in the South China Sea*. diakses melalui: <https://chasfreeman.net/diplomacy-on-the-rocks-china-and-other-claimants-in-the-south-china-sea/>
- Kaplan, Robert D. 2011. *South China Sea is the Future of Conflict*. Diakses melalui <http://foreignpolicy.com/2011/08/15/the-south-china-sea-is-the-future-of-conflict/>
- Kuok, Lynn. 2015. *Tides of change: Taiwan's Evolving Position in the South China Sea*. Diakses melalui: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/taiwan-south-china-sea-kuok-paper.pdf>
- Leifer, Michael. *Stalmate in the South China Sea*. Diakses melalui: <http://www.southchinasea.org/files/2012/03/leifer-Michael-Stalmate-in-the-South-China-Sea.pdf>
- Lu, Yeh-Chung. *The South China Sea and Great Power Politics: Implications for U.S.-China-Taiwan Relations*. Diakses melalui: https://www.stimson.org/sites/default/files/fileattachments/south_china_sea_and_great_power_politics_yeh-chung_lu_0_0.pdf
- McDevitt, Michael. 2014. *The South China Sea: Assessing U.S Policy and Option For The Future*. Diakses melalui: https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-009109.pdf
- Ravindran, Madhu Sudan. 2012. *China's Potential for Economic Coercion in the South China Sea Disputes: A Comparative Study of the Philippines and Vietnam*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Diakses melalui: <https://dnb.info/1032246359/34>
- Ring, Andrew H. 2012. *A US South China Sea Perspective: Just over the Horizon*. Harvard University: Weatherhead Center for International

- Affairs. Diakses melalui:
<https://programs.wcfia.harvard.edu/files/fellows/files/ring.pdf>
- Roach, J Ashley. 2014. Malaysia and Brunei: An Analysis of Their Claims in the South China Sea. Washington; CNA Corporatio. Diakses melalui:
https://www.cna.org/cna_files/pdf/IO P-2014-U-008434.pdf
- Rourke, Ronald. 2018. Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress. Diakses melalui:
<https://fas.org/sgp/crs/row/R42784.pdf>
- Satyawan, Agung. 2010. Komunikasi Negosiasi China terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. Jurnal Komunikasi Massa Vol. 3 No. 2
- Thayer, Carlyle A. The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea. diakses melalui:
<https://www.regionalsecurity.org.au/Resources/Documents/vol6no2Thayer.pdf>
- United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. Limits in the Seas No. 143. China: Maritim Claims in the South China Sea diakses melalui:
<https://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf>
- Vuving, Alexander L. 2014. Vietnam, The United States, and Japan in the South China Sea. Diakses melalui:
www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=AD1032423